

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Asia Pasifik merupakan konsentrasi produsen senjata tertinggi selain Amerika Serikat dan Eropa. Sementara nilai industri militernya hanya sekitar 10% dari total produksi industri senjata global.¹ Keseluruhan industri senjata global mungkin, pada permukaannya muncul relatif tidak berubah dari perang dingin di masa lalu, jumlah *second-tier of arms-producing states*² secara kasar tetap konstan dan negara-negara tersebut sebenarnya bisa terlibat dalam sebuah produksi peningkatan sistem senjata canggih angkatan bersenjata suatu negara.

Terjadi evolusi yang dramatis dalam industri persenjataan global dimana globalisasi memberikan tempat yang luas dalam industri ini. Globalisasi dari industri senjata menyajikan banyak tantangan potensial bagi keamanan internasional, khususnya pengawasan senjata. Oleh karena itu hampir tidak dapat dibedakan bentuk proliferasi ke *second-tier of arms-producing states* di negara berkembang dari *first-tier of arms-producing states*³.

Second-tier of arms-producing state tampaknya lebih tergantung dari sebelumnya pada *first-tier of arms-producing country* untuk teknologi, komponen, modal dan pekerjaan. Ketika pasar senjata telah mengontrak dan industri telah berjalan secara rasional, sebagian besar produksi persenjataan telah menjadi lebih mengglobal, terpadu dalam hubungan yang hirarkis.

Kemunculan seperti itu saling terkait dan berhirarki industri senjata global, salah satunya semakin berorientasi pada suatu pembagian kerja internasional memiliki yang banyak implikasinya. Kerjasama tersebut, melibatkan seperti halnya transfer permanen sumber daya, keahlian, dan teknologi yang mendasari produksi persenjataan, secara potensial lebih stabil daripada penjualan senjata langsung.

¹ The Military Balance 2009

² *second-tier of arms-producing states*: Australia, Canada, Czech republic, Norwegia, Jepang, dan swedia dan Argentina, Brazil, Indonesia, Iran, Israel, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Taiwan, dan Turki. Juga termasuk China dan India

³ *first-tier of arms-producing states*: misalnya negara Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan Italy.

Era globalisasi ini beberapa negara-negara di Asia Pasifik muncul dengan industri pertahanan menuju *autarky*. Demi mengejar kemajuan teknologi sebagai tujuan nasional untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan produksi senjata sendiri. Diantara bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik yang memproduksi senjata terdapat preferensi untuk menuju kemandirian pengadaan dan memproduksi senjata. Akibatnya ada substansi investasi dalam teknologi pertahanan nasional dalam dasar industri pertahanannya.

Meskipun tidak jarang negara-negara ini kekurangan akan teknologi dan kemampuan industri namun disiasati dengan pembelian lisensi senjata dan transfer teknologi senjata. Beberapa dari negara ini memberanikan diri masuk dari industri pertahanan domestik menuju rantai perdagangan global.

Pada tahun 1945 ada empat negara Dunia Ketiga yang memiliki industri senjata militer. Kemudian bisa membentuk sistem internasional yaitu seperti Argentina, Brazil, Afrika Selatan, dan India. Di tahun 1982 ada lebih dari 50 produsen senjata di dunia ketiga yang memproduksi *small arms*, amunisi dan alat utama sistem persenjataan lainnya.⁴

Saat ini negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa tidak lagi menikmati posisi monopoli seperti posisi mereka sebelumnya yang berkaitan dalam produksi dan perdagangan senjata dunia. Amerika Serikat telah berusaha untuk menggunakan posisinya sebagai pemasok mekanisme dalam mengontrol kliennya dengan melalui embargo senjata. Industri pertahanan setelah perang dingin usai menyebabkan perubahan di dalam dinamika politik internasional.

Di negara-negara Asia Pasifik lainnya seperti India, Pakistan dan Iran kemandirian industri dalam negeri mereka bukan lagi pada level kampanye tapi sudah menjadi sebuah kebanggaan nasional. Walau dari segi teknologi produk mereka masih jauh tertinggal, seperti pesawat tempur *sageh* yang merupakan versi pengembangan industri pertahanan Iran untuk pesawat F-5 *tiger*.

Iran mengawali industri pertahanan dari basis industri pertahanan modern dikembangkan selama periode Syah melalui *strategi substitusi impor*, di mana

⁴ Robert M. Rosh, Third World Arms Production and the Evolving Interstate System, jstor.

Iran akan belajar untuk memproduksi, merakit, memperbaiki dan memelihara peralatan militer dari Amerika Serikat dan Inggris.

Amerika Serikat dan Inggris adalah pemasok utama pesawat, *armor* dan senjata ringan. Dimulai pada pertengahan-1970-an, Iran menandatangani perjanjian ko-produksi untuk lisensi pembuatan pesawat, helikopter, rudal permukaan-ke-udara, dan komputer dan peralatan elektro-optik.⁵

Terdapat empat organisasi milik negara Iran merupakan unsur utama dari basis industri pertahanan. *Military Industries Organization* (MIO) adalah pusat kendali utama, dan juga memproduksi senjata ringan, roket, mortir, dan artileri. *Iran Aircraft Industries* (IAI) difokuskan pada pesawat tempur, *Iran Helicopter Industries* (IHI) di helikopter, dan *Iran Elektronika Industri* (IEI) di pertahanan elektronik.⁶

Seperti halnya Iran, Korea Selatan juga mengawali industri pertahanannya pada tahun 1970-an. Sekitar 1973 Undang-Undang tentang Industri Pertahanan dikeluarkan. Tahun 1974 Rencana Peningkatan angkatan bersenjata dan Pertahanan Korea Selatan. 1975 Undang-Undang Pajak yang dirancang untuk membiayai pengembangan industri pertahanan.⁷ Ini dukungan dari industri pertahanan juga sebagian besar didasarkan pada kebijakan umum Pemerintah selama tahun 1970-an pengasuhan investasi dalam pembuatan kapal, baja, dan industri elektronik.

Indonesia juga mempunyai PT PAL, PT Pindad, PT Dahana dan PT Dirgantara Indonesia, yang semuanya merupakan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS). Keempat perusahaan milik Negara ini telah banyak menghasilkan beragam alat utama sistem senjata (alutsista) yang dipakai oleh TNI dan Polri.

Senjata produksi Indonesia yang terkenal diantaranya senapan serbu SS1 dan penerusnya SS2 serta pesawat CN-235 dan NC-212 yang telah digunakan

⁵ <http://www.globalsecurity.org/military/world/iran/industry.htm>

⁶ *ibid*

⁷ <http://www.globalsecurity.org/military/world/RoK/industry.htm>

oleh Negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab, pada tahun 1991, Kamboja 1992, sementara pengimpor terbesar adalah Nigeria. Hampir 3000 pucuk senapan SS1-VI dikirim kenegara Afrika diantara tahun 1990-1998⁸ dan CN-235 telah di eksport ke UNI Emirat Arab, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan.⁹

Berbicara tentang betapa hebatnya produk dalam negeri, tidak salah adanya kampanye cintai produk asli Indonesia. Hal ini terlihat bagaimana usaha mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla memesan APS-2 *Anoa* buatan Pindad.¹⁰ Kemandirian dalam industri pertahanan sangat penting untuk lepas dari ketergantungan terhadap negara lain.

Pada masa pemerintahan orde baru telah ada usaha menempatkan industri senjata dalam kerangka *grand strategy* pertahanan nasional. Terlihat pada pembuatan roket-roket taktis yang tidak terlalu rumit pembuatannya dan sangat penting untuk menjaga selat-selat di wilayah terluar Indonesia. Roket-roket ini praktis akan menjadi *deterrence* tersendiri jika di tempatkan sekitar Selat Malaka, Selat Sunda, Selat di dekat wilayah negara Timor Lorosae hingga ke wilayah Banda dan Marauke. Roket ini sekelas BM-21 *grad* buatan Rusia atau *katyusha*. Bentuknya memang ketinggalan zaman namun pengoperasiannya mudah dan praktis, banyak negara yang mengandalkan roket ini, yang pada masa itu di beri nama SBU Defence.¹¹

Cukup terlihat pada masa Orde Baru telah diletakan pondasi akan industri pertahanan Indonesia, namun yang menjadi kendala saat ini bagaimana pemerintahan sekarang bisa melanjutkan dan mengembangkan industri ini baik dari segi modalnya dan menajemen perusahaannya.

Pada kasus Korea Selatan perekonomiannya yang sama seperti Indonesia pada masa akhir pemerintahan orde baru. Sama-sama terkena imbas krisis

⁸ Angkasa edisi koleksi No.IV 2009, Alutsista dalam negeri , cikal-bakal senapan serbu nasional, hal 39.

⁹ Ibid hal 8.

¹⁰ <http://defense-studies.blogspot.com/2009/06/pt-pindad-serahkan-20-panser-aps.html>

¹¹ Op.cit hal 15.

moneter, namun perbedaannya bagaimana Korea Selatan keluar dengan cepat dari krisis tersebut.

Pada kasus Korea Selatan ketika pertumbuhan ekonominya sekitar 7-10% mereka menaikkan anggaran pertahanan 3-6 % dari GDP.¹² Hal ini menjadi *dilemma* bagi Indonesia karena sebenarnya, untuk Indonesia, alokasi anggaran pertahanan sudah sejalan dengan gerakan internasional untuk menurunkan belanja militer dunia. IMF dan Bank Dunia telah membuat suatu rekomendasi kepada negara-negara berkembang yang mengalami kesulitan finansial untuk membatasi pengeluaran militer dan pembelian senjata internasional.¹³

Dorongan untuk mengurangi anggaran pengeluaran militer dengan memanfaatkan momentum berakhirnya Perang Dingin, dikenal dengan istilah *peace dividend*. Dalam dokumen *In Facing One World* (1991) yang dikeluarkan *Independent Group on Financial Flows to Developing Countries*, yang dipimpin oleh Helmut Schmidt, kelompok ini menyarankan antara lain bahwa prioritas untuk bantuan keuangan diberikan kepada negara-negara yang pengeluaran keamanannya tidak melebihi 2% dari PDB. Usul serupa juga dapat dilihat dari pidato Robert McNamara, mantan presiden Bank Dunia di depan *World Bank Annual Conference on Development Economics* pada tahun 1991.¹⁴

Usulan tersebut juga diperkuat oleh Kode Etik Arias yang mendorong negara-negara untuk lebih mendukung pembangunan manusia (*human development*) yang ditandai dengan proporsi belanja negara untuk kesehatan dan pendidikan lebih besar dari belanja pertahanan.¹⁵

Namun faktanya sistem pertahanan Indonesia tidak berfungsi sepenuhnya. Dimana ada 3 strategi efisiensi sistem persenjataan yang bisa dilakukan diantaranya pertama, *arms disposal* dan *arms build up*, kedua, diversifikasi jenis persenjataan dikurangi, ketiga, pengurangan variasi sumber negara produsen.¹⁶

¹² Uk Heo and Sung Deuk Hahm, *Politics, economics, and defense spending in south korea*, sagepub.com

¹³ Andi widjajanto, pengembangan kemampuan pertahanan Indonesia, **Universitas Indonesia**

¹⁴ ibid

¹⁵ ibid

¹⁶ ibid

Tiga langkah ini mungkin akan mengurangi pengeluaran rutin anggaran pertahanan Indonesia.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh industri pertahanan Indonesia diantaranya pertama, tidak adanya lagi program jangka panjang yang dampaknya menyulitkan penyusunan kebutuhan senjata masa depan. Kedua, minimnya permintaan TNI yang merupakan satu-satunya *user* akibat anggaran belanja senjata yang terlalu kecil.

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Pertahanan Tahun 2000-2004 *untuk memambangun kekuatan pertahanan Negara secara proporsional dan bertahap dalam rangka mewujudkan postur kekuatan negara yang professional, efektif, efisien serta modern dengan kualitas dan mobilitas yang tinggi sehingga mampu dalam yang relatif singkat diproyeksikan keseluruhan penjuru tanah air, serta dapat dengan cepat dikembangkan kekuatan dan kemampuannya dalam keadaan darurat.*¹⁷

Rencana ini sebagai alternatif untuk menghadapi skenario terburuk dalam mengembangkan sistem pertahanan dalam antisipasi kehancuran tertinggi seperti perang global atau melibatkan senjata pemusnah massal.

Di lihat dari Postur Pertahanan dari 3 Matra Darat, Laut, Udara efek penangkalan dari sistem persenjataan kita tidak dapat menimbulkan efek penangkalan yang signifikan. Indonesia bahkan tidak dapat menyamai ataupun menandingi kekuatan pertahanan negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Saat ini hampir setiap bangsa di Asia-Pasifik cukup besar menghasilkan beberapa bentuk produk pertahanan, dalam banyak kasus ini adalah *low-end item*, seperti senjata ringan (umumnya sisi senapan serbu dan senjata diproduksi di bawah lisensi) dan amunisi.

Hanya segelintir negara yang memiliki kecanggihan yang relatif dan berbasis industri pertahanan yang luas. Kokusanka, atau kemandirian dalam

¹⁷ Surutan keputusan Menteri Pertahanan Nomor: SKEP/ 447/M/VII/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Tahun 2000-2004.

produk pertahanan, adalah sebuah konsep penting di Jepang, dan Jepang telah mengerahkan sumber daya yang cukup untuk membangun dan mempertahankan teknologi maju industri senjata domestiknya, sebagian besar yang tertanam dalam, diversifikasi konglomerat, seperti Mitsubishi Heavy Industri dan Kawasaki Heavy Industries. Pasukan Bela Diri Jepang atau (SDF) bergantung terutama pada mengembangkan sistem senjata buatan sendiri, dan akan hanya membeli peralatan militer dari pemasok luar negeri, ketika produksi lokal tidak layak secara ekonomis.¹⁸

Korea Selatan telah membangun basis industri pertahanan yang mengesankan. Industri senjata lokal terutama berbasis luas, dipicu oleh investasi yang cukup besar di aerospace, sistem daratan dan sektor pembuatan kapal. Sebagai akibatnya, hampir 80% dari senjata Korea Selatan diperoleh di dalam negeri. Seperti di Jepang, hampir produksi pertahanan Korea terkonsentrasi di anak perusahaan konglomerat besar, seperti Hyundai, Samsung dan Daewoo.¹⁹

Cina telah lama mengupayakan untuk menjadi mandiri dalam pengembangan dan produksi persenjataan, dan memiliki wilayah terbesar di industri pertahanan. Basis industri pertahanan China meliputi lebih dari 1000 perusahaan milik negara (BUMN) yang mempekerjakan sekitar tiga juta pekerja, termasuk lebih dari 300.000 Insinyur dan teknisi. Cina adalah salah satu dari beberapa negara, di negara berkembang yang memproduksi lengkap peralatan militer, dari senjata ringan hingga kendaraan lapis baja, kapal perang, pesawat tempur dan kapal selam, serta senjata nuklir dan rudal balistik antar benua. Namun selama beberapa dekade, industri senjata Cina menderita beberapa kelemahan, termasuk terbelakangnya basis R & T, kelebihan kapasitas industri dan pola pikir BUMN yang bernilai kuota dan pekerjaan di atas kemampuan dan pelanggan responsif.²⁰

Dari bentuk transfer senjata di negara-negara Asia Pasifik ada yang berbentuk impor senjata ke negara-negara tersebut diantaranya:

¹⁸ The Military Balance 2009

¹⁹ ibid

²⁰ ibid

Table 1.1 Trasfer Senjata Ke Negara-negara Asia Pasifik Melalui Impor 2000-2008

| No. | Ranking 2008 | Negara | Impor | Kuantitas | Tipe Senjata | |
|-------|--------------|---------------|--------------------|-----------|------------------------|--------------------------------|
| 1 | 4 | China | Aircraft | 1738 | Combat Aircraft | |
| | | | Sensors | 213 | | |
| | | | Air Defence System | 68 | | |
| | | | Armoured Vehicles | 471 | | Armour Combat Vehicles |
| | | | Artillery | 214 | | Large-Calibre Artillery System |
| | | | Missiles | 779 | | Missile And Missile Launcher |
| | | | Ships | 366 | | Warship |
| 2 | 2 | India | Aircraft | 6757 | Combat Aircraft | |
| | | | Air Defence System | 18 | | |
| | | | Armoured Vehicles | 2075 | | Armour Combat Vehicles |
| | | | Artillery | 211 | | Large-Calibre Artillery System |
| | | | Engines | 258 | | |
| | | | Missiles | 3115 | | Missile And Missile Launcher |
| | | | Sensors | 763 | | |
| Ships | 1374 | Warship | | | | |
| 3 | 14 | Jepang | Aircraft | 2186 | Combat Aircraft | |
| | | | Artillery | 128 | | Large-Calibre Artillery System |
| | | | Engines | 660 | | |
| | | | Missiles | 326 | | Missile And Missile Launcher |
| | | | Sensors | 581 | | |
| | | | Ships | 100 | | Warship |
| 3 | 1 | Korea Selatan | Aircraft | 5148 | Combat Aircraft | |
| | | | Air Defence System | 986 | | |
| | | | Armoured Vehicles | 654 | | Armour Combat Vehicles |
| | | | Artillery | 64 | | Large-Calibre Artillery System |
| | | | Engines | 388 | | |
| | | | Missiles | 1099 | | Missile And Missile Launcher |
| | | | Sensors | 467 | | |
| | | | Ships | 875 | | Warship |
| 4 | 6 | Singapura | Aircraft | 1592 | Combat Aircraft | |
| | | | Armoured | 125 | Armour Combat Vehicles | |

| | | | | | | |
|----------|-------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 5 | 16 | Malaysia | Vehicles | | | |
| | | | Artillery | 11 | Large-Calibre Artillery System | |
| | | | Engines | 134 | | |
| | | | Missiles | 413 | Missile And Missile Launcher | |
| | | | Sensors | 201 | | |
| | Ships | 1325 | Warship | | | |
| | 6 | 23 | Australia | Aircraft | 751 | Combat Aircraft |
| | | | | Air Defence System | 138 | |
| | | | | Armoured Vehicles | 203 | Armour Combat Vehicles |
| | | | | Artillery | 44 | Large-Calibre Artillery System |
| | | | | Engines | 45 | |
| Missiles | | | | 363 | Missile And Missile Launcher | |
| Other | | | | 19 | | |
| Sensors | | | | 110 | | |
| Ships | 310 | Warship | | | | |
| 6 | 23 | Australia | Aircraft | 1387 | Combat Aircraft | |
| | | | Air Defence System | 79 | | |
| | | | Armoured Vehicles | 365 | Armour Combat Vehicles | |
| | | | Artillery | 32 | Large-Calibre Artillery System | |
| | | | Engines | 48 | | |
| | | | Missiles | 999 | Missile And Missile Launcher | |
| | | | Other | 49 | | |
| | | | Sensors | 487 | | |
| | | | Ships | 2383 | Warship | |

SIPRI 2009

1.2 Perumusan masalah

Tidak sedikit negara yang menghadapi problem serupa sehingga tidak berani mengejar kemandirian (self-sufficiency) dalam pemenuhan sarana pertahanan nasional. Namun ada beberapa negara yang berhasil melakukannya karena mampu mengatasi sejumlah masalah yang krusial. Salah satunya dengan mengalihkan pengaturan produksi senjata ke departemen pertahanan. Seperti korea selatan yaitu dengan cara memberdayakan sejumlah industri dalam program perkuatan sistim pertahanan nasional tanpa mengganggu kesehatan financial di industri tersebut.

Sebaliknya pihak pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan anggaran ekstra karena untuk pemesannya cukup diberikan *government obligation*. Sehingga industri itu mampu mengerjakan pesanan mesin pesawat tempur, kendaraan tempur, korvet, dan persenjataan lainnya dengan nilai modal yang tidak kecil. Pemerintah Korea selatan tinggal menyebutkan saja berapa senjata yang akan dipesan untuk kebutuhan angkatan bersenjata. Mereka pun tak perlu membayar dengan harga pasar. Namun setelah pesanan itu selesai, kepada pabrik-pabrik itu diberi hak menjual ke negara lain dengan harga pasaran internasional.²¹

Iran telah mengambil inisiatif untuk memanfaatkan relaksasi ketegangan antara negara-negara Arab untuk memperluas penjualan senjata internasional. Iran telah membuat persenjataan terbatas penjualan ke negara-negara Afrika (misalnya, Katyusha peluncur ke Sudan). Namun tujuan yang lebih besar adalah untuk membangun Iran sebagai penyedia layanan teknis, dan persenjataan, untuk negara-negara Teluk Arab.

Jika negara-negara di Asia Pasifik mampu membangun industri pertahanannya dengan transfer teknologi militer dengan negara produsen senjata utama, dan bahkan sudah mulai memasarkan produk militernya ke pasaran global. Muncul pertanyaan penelitian : **Mengapa industri senjata Indonesia belum - autarky, seperti halnya Negara Asia Pasifik lainnya(2000-2008)?**

1.3 Kerangka pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua kerangka pemikiran yaitu kerangka konsep pasar senjata internasional yang menggunakan pemikiran Andrew L. Ross dan pemikiran Richard A. bitzinger. Sementara kerangka operasionalisasi menggunakan konsep pasar senjata dan mekanisme transfer senjata internasional Andi Widjajanto dan Makmur Keliat dalam buku reformasi ekonomi pertahanan di Indonesia, yang nantinya akan di operasionalisasikan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Wacana mengenai pasar senjata internasional merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas, dimana negara yang di sebut sebagai negara *emerging*

²¹ Angkasa edisi koleksi No. IV 2009, Alutsista dalam negeri, cikal-bakal senapan serbu nasional, hal 15

market seperti Brasil, Rusia, India dan China berlomba-lomba untuk mengupgrade teknologi persenjataannya baik melalui pembelian senjata hingga transfer teknologi persenjataan dengan berbagai bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama ini akan berdampak terjadinya transformasi power di sistem internasional. Perubahan terjadi dalam proliferasi senjata pada sistem internasional dan proliferasi senjata itu bisa bersifat vertikal dan horizontal. Vertikal bahwa suatu negara berusaha memiliki dan mengembangkan juga menggunakan senjata yang terbaru. Proliferasi senjata ini bisa saja menyebabkan perlombaan senjata (*Arms race*) setidaknya antara dua negara. Yang nantinya akan mengarah kepada *security dilemma*. Proliferasi senjata secara Horizontal biasanya dilakukan dengan cara pendistribusian senjata tertentu kepada negara-negara sekutunya.

Kepemilikan teknologi senjata oleh sebuah negara merupakan sebuah keharusan untuk membuktikan sebuah eksistensi kepada negara tetangga atau pun negara-negara di tingkat regional. Dari keinginan suatu negara untuk memiliki teknologi persenjataan yang canggih dan usaha pengurangan ketergantungan pasokan senjata dari negara lain maka digunakan konsep *self-sufficiency in arms production* pada sebuah negara. Usaha dalam membuat persenjataan itu sendiri telah diuntungkan oleh keadaan, masa setelah Perang Dingin usai, yaitu era globalisasi. Sementara itu Robert Keohane dan Joseph Nye²² menggambarkan globalisasi dengan menyebutnya dengan istilah globalisme sebagai “situasi dunia yang melibatkan jaringan-jaringan interdependensi pada jarak yang multikontinental”. Keohane dan Nye menggambarkan kesaling ketergantungan itu terjadi pada lima bidang: ekonomi, budaya, masyarakat, lingkungan dan militer. Kemudian kecenderungannya akan terjadi integrasi ekonomi maupun integrasi teknologi.

Menurut teori Bitzinger globalisasi berpotensi mempengaruhi *regional political* dan *military balances*. Serta teknologi merupakan penentu yang krusial dalam efektivitas dalam militer dan segi keuntungan. Kepemilikan senjata modern adalah elemen penting dalam menentukan hierarki kekuatan internasional. Karenanya itu bahwa *diffusion* dari militer dan teknologi akan menciptakan *new*

²² Robert Keohane dan Joseph S. Nye, “Globalization: What’s new? What’s Not (And so What?),” *Foreign Policy*, 2000 hal 118.

centres dari produksi senjata, yang pada akhirnya akan mempengaruhi distribusi *power* dalam hubungan internasional. Banyak negara-negara yang selalu meng-*upgrade military-industrial-complexes*-nya. Hal ini akan secepatnya berdampak kepada *balance of power* di kawasan.

Banyak perusahaan pertahanan barat yang menjadi perusahaan *transnational*, yang identitas domestik dan kesetiaan mereka menjadi kabur dan lebih sulit mengatur apakah berpotensi beraktivitas *proliferation*. Di saat yang sama control pemerintah untuk mencegah perusahaan-perusahaan ini dari terlibat dalam kegiatan yang mengancam kepentingan nasional menjadi lemah. Dengan artian perusahaan ini walaupun milik pemerintah namun telah di privatisasi atau demi peningkatan dari ketergantungan atas pembelian senjata domestik (*domestic arms purchases*).

Bitzinger membagi *Arms market* menjadi dua yaitu *domestic market* dan *global market*. *domestic market* adalah pasar senjata untuk kebutuhan dalam negeri suatu negara yang biasanya *user*-nya adalah angkatan bersenjatanya. *Global market* adalah pasar internasional untuk pemasaran produk senjata negara yang memproduksi baik satu kawasan maupun beda kawasan.

Kemudian, bitzinger mengatakan dibutuhkan *Collaboration: permanent transfer of resource, skills and technologies (with first-tier/second tier collaborative)* untuk transfer teknologi, skill dan sumber daya antara negara produsen ke negara pembeli tentang bagaimana meningkatkan kemampuan untuk memproduksi senjata dan teknologinya. Namun *second tier-arms-produce* harus melakukan *transition* dan *readjustment* dalam industry pertahanannya. Dan pada akhirnya, usaha *Proliferation to second-tier-arms-produce in developing world*, (ada kemungkinan terjadinya proliferasi senjata dalam transfer teknologi senjata antara negara produsen ke negara penerima). Kemudian praktek ini akan mengakibatkan *hub and spoke model*. Dengan adanya transfer teknologi antara *first-tier-arms produce* ke *second tier-arms-produce*, mengakibatkan bangkitnya *second-tier-arms-produce country* menjadi *new centres* dalam produksi senjata menuju *autarky*.

Pada industri senjata global terdapat beberapa hierarki terdapat pada teori Richard A. bitzinger ini pertama, *first-tier of arms-producing country* misalnya negara Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan Italy. Lima negara ini memiliki teknologi tercanggih dalam industri pertahanan dan terbesar didunia. Kelima negara ini menguasai 75% produksi senjata global.²³

Kedua *second-tier of arms-producing country*, meliputi dua kategori yaitu Termasuk negara industri yang memiliki industri yang kecil tapi cukup canggih untuk industri pertahanannya, seperti Australia, Canada, Czech republic, Norwegia, Jepang, dan swedia.²⁴ Selanjutnya negara yang terdiri dari sejumlah negara-negara berkembang atau negara-negara industri baru dengan *military industry complexes* yang sederhana di antaranya Argentina, Brazil, Indonesia, Iran, Israel, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Taiwan, dan Turki. Juga termasuk China dan India negara yang luas yang mempunyai dasar industri pertahanan namun masih sedikit pengalaman

Ketiga, *third-tier state*, yang memiliki keterbatasan dan kemampuan memproduksi senjata karena teknologinya pembuatannya rendah seperti negara Mesir, Mexico dan Nigeria.²⁵

Jika pada teori bitzinger lebih menekankan bagaimana suatu negara secara internalnya menyiapkan langkah-langkah menuju *self-suffiencie* dalam produksi senjata. Teori Andrew L. Ross lebih menekankan kepada bagaimana langkah-langkah memasuki pasar senjata internasional dengan melihat perilaku pasar.

Ada tiga jenis model ideal sisi perilaku pemasok senjata yang berkembang diantaranya kompetisi murni, oligopoli, dan monopoli. Dari sisi permintaan, Ross memakai model *corresponding* dari perilaku kompetitif, oligopsoni, dan monopsoni. Perbedaan ini dapat dimanfaatkan dalam analisis struktur pasar senjata dari perspektif dua aktor (perusahaan dan negara) dan pada dua tingkat (nasional dan internasional).

23

Richard A. bitzinger, *Towards A Brave New Arms Industry?*

²⁴ ibid

²⁵ ibid

Dalam teori ekonomi hubungan langsung antara jumlah aktor, persaingan, dan struktur pasar adalah semakin banyaknya aktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan, semakin besar kompetisi di pasar, dan lebih menyebarnya struktur pasar. Semakin sedikit aktor, semakin sedikit kompetisi dan lebih terkonsentrasinya struktur pasar. Struktur pasar pada barang dan jasa, sebagian besar tergantung pada jumlah aktor yang relevan, apakah satu, dua, atau banyaknya aktor yang bisa menentukan penawaran dan permintaan.

Pada tingkat nasional dari pasar senjata, negara adalah sebuah perusahaan monopsoni dan menjadi satu-satunya konsumen. Negara biasanya dihadapkan oleh beberapa pemasok utama di arena nasional yang disebut sebuah oligopoly, ketika tingkat pasar senjata nasional terpilah. Namun, negara juga dapat menghadapi hanya satu pemasok utama untuk produk spesifik oleh empat sektor industri senjata dalam produksi sistem senjata utama seperti pesawat, kendaraan lapis baja, peluru kendali, dan kapal angkatan laut. Hal ini terlihat jelas pada pola di negara dunia ketiga dalam memproduksi senjatanya sendiri, serta di Eropa Barat dimana industri pertahanan menjadi terkonsentrasi. Namun Amerika Serikat agak kurang tepat di katakan oligopoly dimana masih cenderung menjadi setidaknya sebagai duopoly. Jika tidak sekaligus menjadi oligarki dari keempat sektor di atas: *small arms*, *ammunition*, dan sektor senjata kecil lainnya, namun walaupun begitu masih cenderung menjadi oligopoli.

Pada tingkat nasional, kita cenderung untuk mencari apakah itu oligopoly-monopsoni atau monopsony-monopoly pada struktur pasar. Struktur pasar senjata internasional berbeda dari struktur pasar domestik. Di sisi permintaan, negara tidak lagi menjadi monopsoni. Ada sejumlah besar konsumen potensial dan permintaan dari salah satu konsumen dapat diabaikan proporsinya dari total permintaan. Tidak ada satupun konsumen yang mempunyai kekuatan monopsoni.

Namun sisi penawaran dari pasar internasional akan muncul menjadi jauh lebih kompetitif dari sisi penawaran pasar nasional jika semua negara dan sektor swasta pemasok diperhitungkan. Sangat jelas bahwa sejumlah aktor yang relatif besar mengisi sisi penawaran dari pasar senjata internasional.

Sebelum mengetahui teknis dari struktur pasar senjata ada baiknya kita mengetahui teori ekonomi oligopoly dari Augustin Cournot ahli politik ekonomi

perancis. Dengan mengetahui karakter dari oligopoly ini, ada tujuh karakteristik dari jenis ideal oligopoli, karakter yang pertama adalah sebuah struktur karakteristik dan enam sisanya merupakan karakter perilaku utama. Dengan ketujuh ini kita dapat menilai sejauh mana pasar senjata internasional sesuai dengan struktur ini dan atribut perilaku, untuk menggambarkan sisi penawaran pasar yang oligopolistic.

Tabel 1.2 Tujuh Karakteristik Ideal Oligopoli.

| Karakteristik | Uraian | Keterangan tambahan |
|---------------|---|---|
| Pertama | Pada sisi penawaran, bagaimana pun, beberapa pemasok besar yang mendominasi pasar | hanya satu pemasok kita akan memiliki monopoli, batas maksimum yang ditetapkan secara empiris |
| Kedua | apakah dalam kondisi yang lengkap atau oligopoli linear, adalah saling ketergantungan pemasok | Pemasok terlibat dalam berbagi kompetisi oligopolistis saling memberi pengakuan dan strategis ketergantungan mereka |
| Ketiga | oligopoli adalah kemurnian sifat produk yang di produksi atau di jual | Beberapa pemasok yang besar bersaing dalam suatu pasar oligopolistik, Namun, dapat menyediakan baik produk homogen atau berbeda. |
| Keempat | persaingan dalam kompetisi oligopoli terutama Non-harga | pemasok untuk tidak hanya menanggapi permintaan konsumen tetapi juga untuk membuat, bentuk, dan mengubah permintaan dan pilihan konsumen. |
| Kelima | harga cenderung relatif stabil | pemasok oligopolistik ketika tergoda untuk memaksimalkan |

| | | |
|---------|--|--|
| | dari waktu ke waktu | keuntungan melalui manipulasi harga adalah dengan memperbesar pangsa pasar, bisa diganti untuk memaksimalkan keuntungan |
| Keenam | ada hambatan tinggi untuk masuk pada sisi penawaran | pemasok oligopolistik cenderung menikmati keuntungan absolut yang berasal dari kontrol teknologi mereka, pemasukan, pengaturan pemasaran, pilihan konsumen untuk produk-produk ditetapkan pemasok. |
| Ketujuh | mungkin tapi tidak merupakan fitur penting dari oligopoli adalah <i>price leadership</i> . | <i>Price leadership</i> ini melibatkan kerjasama secara diam-diam di antara pemasok dalam mengadopsi harga yang telah ditetapkan. |

Dalam ciri-ciri *market behavior* di pasar senjata internasional bisa diidentifikasi melalui tujuh karakter ideal oligopoly menurut teori Augustin Cournot di atas. Dan perlu diingat bahwa lima karakter yang diperlukan dan satu karakter kemungkinan tidak dibutuhkan dalam konsep *Market behavior* dalam oligopoly pada teori Andrew L. Ross. Pertama, *The Interdependence of Suppliers*, Pemasok dalam pasar oligopolistik harus saling tergantung dan berbagi pengakuan saling ketergantungan mereka menurut teori oligopoli. Sementara pemasok di pasar senjata internasional memang saling terkait, saling ketergantungan mereka tidak diinduksi oleh pasar tapi oleh kekuatan politik. Kedua, *The Nature of Products*, Produk yang diproduksi dan dijual di pasar senjata internasional juga tidak secara eksklusif sejenis atau tidak dibedakan. Walaupun mungkin beberapa produk yang diproduksi dan dijual benar-benar unik dan tidak memiliki substitusi. Terkadang ada barang pengganti produk yang disediakan oleh sebagian pemasok besar. Walaupun, produk mereka tidak bisa

dikatakan sejenis. Sifat produk yang diproduksi dan dijual di pasar senjata internasional, sesuai dengan yang ditetapkan oleh teori oligopoli.

Ketiga, *The Nature of Competition*, Teori Oligopoli memberikan deskripsi akurat tentang sifat kompetisi di antara pemasok di pasar senjata internasional. Persaingan harga telah dibayangi oleh bentuk-bentuk lain kompetisi komersial (dan persaingan politik juga) telah mencatat keunggulan persaingan teknologi lebih dari persaingan harga. Pemasok menekankan kinerja, kemudahan pengoperasian, dukungan dan layanan purna jual, dan mereka kemampuan untuk memenuhi pesanan dengan cepat dengan harga yang ditentukan. Kompensasi dalam perjanjian perdagangan terdapat kesepakatan diantaranya *direct and indirect offsets, co-production, licensed production, sub-contractor production, investment, technology transfer, barter, and countertrade*.

Keempat, *Stability of Prices*, Meskipun tidak tersedianya sistematis, lintas nasional, longitudinal data harga, jelas bahwa harga di pasar senjata internasional, seperti dalam pasar senjata nasional, belum stabil seperti yang diharapkan dalam pasar oligopolistik. Dalam prakteknya pemasok memberikan hibah ataupun memberi harga di bawah harga pasar dan ekspor dibawah suku bunga pasar. Karena produk di pasar senjata internasional meningkat. Sedikit bukti stabilitas harga dan juga *price leadership* juga kurang terlihat.

Kelima, *Barriers to Entry*, menurut teori oligopoli ada hambatan tinggi untuk masuk dalam pasar oligopolistik. Pada pasar senjata internasional pada masa setelah PD II, Namun, yang luar biasanya tidak terlihat adanya hambatan masuk. Britania contohnya yang merupakan pemasok utama senjata saat perang yang pulih setelah pada PD II kembali menjadi pemasok utama lagi. Negara eropa barat lainnya seperti Perancis, Italy, Jerman barat saat itu juga masuk ke pasar ekspor dan menjadi pemasok utama di bidang senjata. Kemudian, bermunculan negara dari dunia ketiga masuk ke ekspor produksi senjata seperti khususnya Brazil, Israel dan Korea Selatan yang kemudian mengikis dominasi tradisional negara maju pemasok industri senjata.

Bukan hanya hambatan masuk tidak dapat diatasi, tetapi pendirian produsen dan eksportir yang telah konsisten membantu pendatang yang bercita-

cita tinggi dalam pasar dengan menyediakan mereka dengan teknologi militer yang diperlukan. Contohnya Amerika Serikat yang menyuplai teknologi militer setelah perang Dunia II usai kenegara Eropa Barat. Kemudian negara-negara industri maju ini memberikan kepada negara di dunia ketiga teknologi senjata untuk memproduksi dan mengekspor senjata.

1.4 Tujuan atau Signifikansi Penelitian

a . Adanya bentuk transfer teknologi senjata dari negara pemasok ke negara penerima yang berbentuk pasar oligarki dalam penguasaan pasar senjata. Namun terlihat jelas bagaimanapun motivasi politik lebih dominan dari pada ketimbang kekuatan pasar.

- b. *Self-suffience* bagi Indonesia memungkinkan Indonesia menjadi *new centres* dalam produksi senjata. Selain penguatan kekuatan militer juga dapat menjadi pemasok senjata atau eksportir senjata baru bagi negara-negara lain.

1.5 Hipotesa

Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat di tarik hipotesa sebagai berikut:

Ketidakmampuan Indonesia menuju defense industri yang autarky karena perilaku pasar senjata tidak kondusif bagi Indonesia

Dengan variable sebagai berikut:

1.6 Variable Independen

Penyebab-penyebab yang menghambat *self-suffience* Indonesia dalam membuat senjata. Dengan indikator sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak mencukupi alokasi anggaran pembelian alutsista tentara nasional dan pembuatan alutsista di PT. Pindad atau pun di PT PAL .
2. Pengesahan rencana alokasi anggaran oleh komisi I DPR RI yang tidak sesuai kebutuhan pertahanan Indonesia.

3. Pemerintah tidak dengan mudah memberikan kepercayaan kepada industri pertahanan sendiri.

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya *self-suffiience* Indonesia dalam memproduksi senjata sendiri. Indikatornya sebagai berikut:

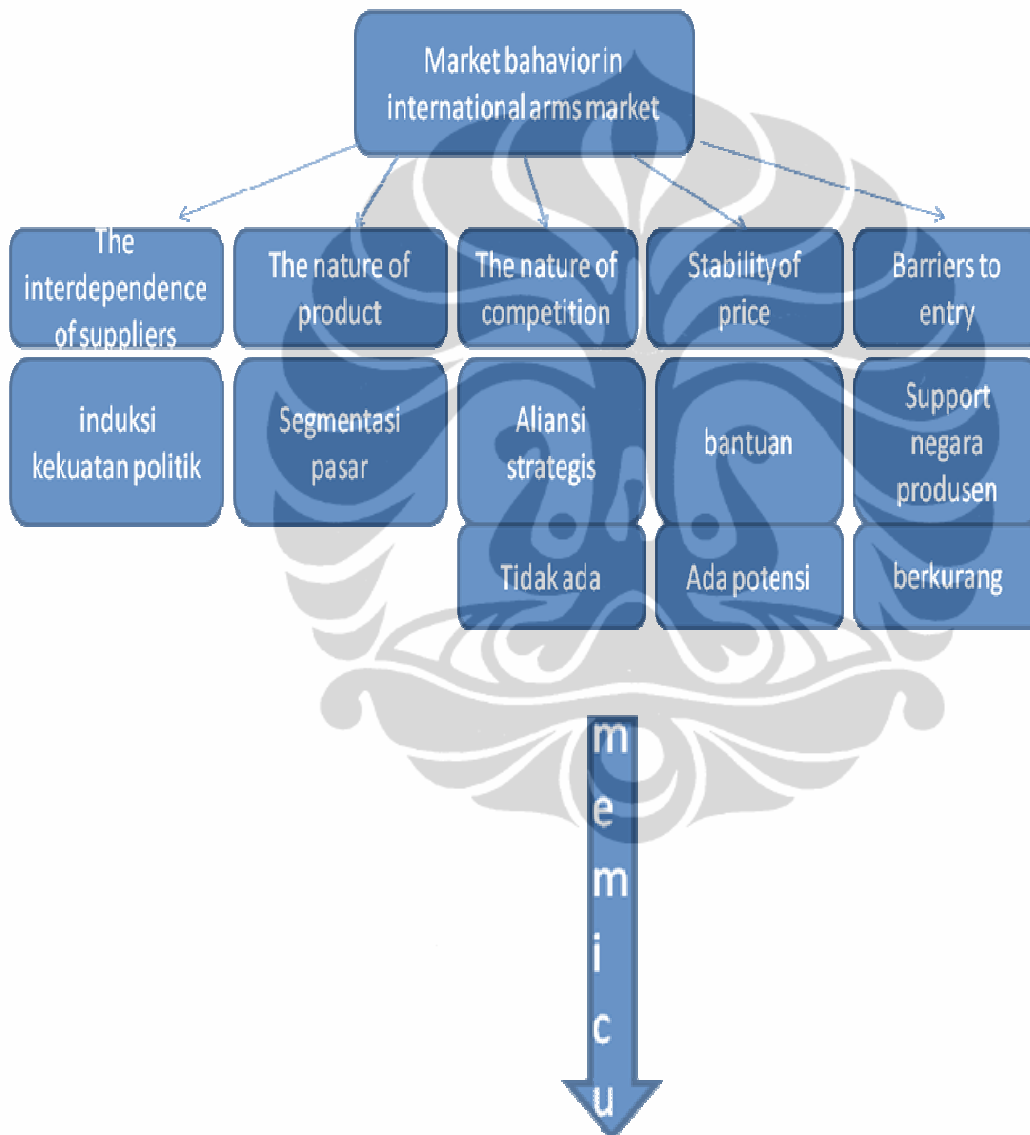
1. Efek penangkalan dari sistem persenjataan Indonesia tidak dapat menimbulkan efek penangkalan yang signifikan.
2. Kurangnya kemampuan dari para perancang Alutsista di perusahaan pertahanan Indonesia.
3. Kebanggaan bangsa dalam hal kepemilikan rancangan Alutsista sendiri akan hilang.

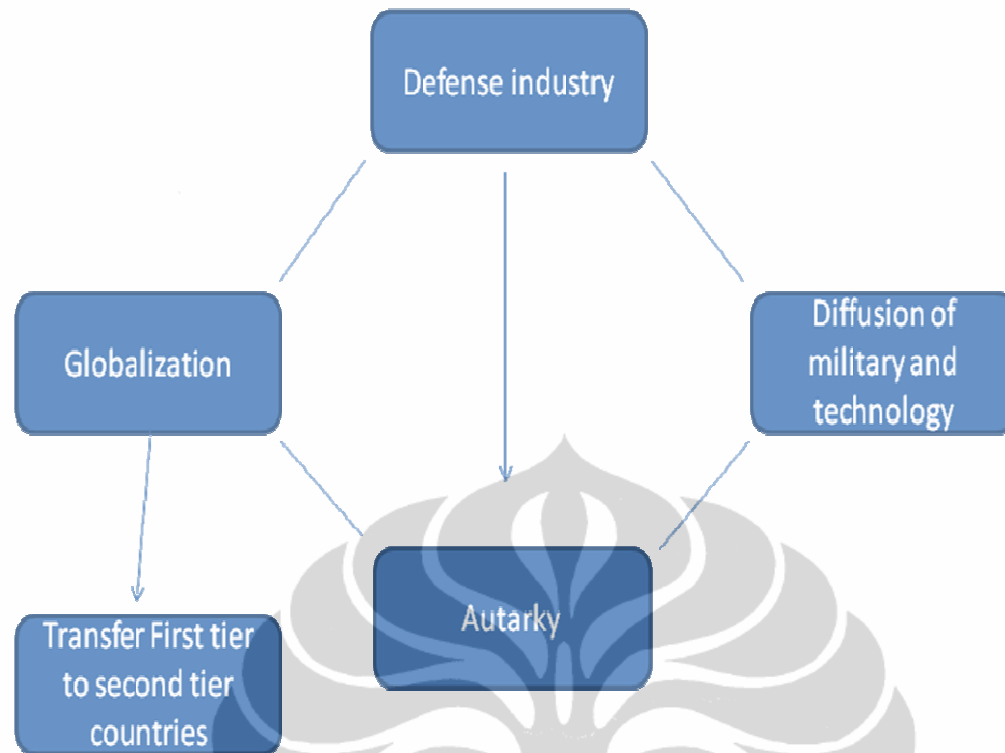
1.7 Model analisa



1.8 Operasional konsep

Implementasi konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini akan menjabarkan proses berpikir yang digunakan sebagai alat analisa dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua pemikiran utama, konsep *market behavior* dan konsep *self-suffience*. Penjabaran konsep *market behavior* dan konsep *self-suffience* akan dijabarkan pada diagram berikut di bawah ini.





1.9 Hubungan Antar Konsep

Hubungan dan keterkaitan antara dua kerangka pemikiran di atas dapat di jelaskan dalam batasan pertanyaan penelitian yang menjelaskan bagaimana konsep *market behavior oligopoly* ini menjelaskan bagaimana bentuk *arms trade* di negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan bagaimana menjelaskan prosedur *arms trade* dari negara pemasok. Konsep *self-suffiencence* digunakan menjelaskan proses transfer dan produksi senjata kenegara *first-tier of arms-producing* kepada negara *second-tier of arms-producing*. Keterkaitan dua kerangka pemikiran tersebut mengarah pada bentuk koneksitas dan afiliasi dua kerangka pemikiran yang digunakan dalam menjelaskan dan menjawab secara komprehensif pertanyaan penelitian. Serta afiliasi kedua kerangka pemikiran penelitian ini akan memberikan gambaran secara makro dan mikro, bagaimana Indonesia melihat kemungkinan untuk menuju *autarky* dalam produksi senjata.

1.10 Prosedur dan Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah langkah analisa yang akan ditempuh untuk menganalisa perubahan politik yang di tentukan oleh kepemilikan teknologi

senjata melalui transfer teknologi senjata dari *first-tier of arms-producing country*.

Fokus penelitian ini akan menekan pada spesifikasi waktu tahun 2000-2008. Tahun 2000 di ambil karena Uni Eropa tidak memperpanjang lagi embargo senjatanya terhadap Indonesia.²⁶ Setahun setelah itu terjadi peristiwa 9/11 yang menyebabkan perubahan lingkungan strategis dunia internasional, yang melatarbelakangi pemerintahan Bush mengeluarkan kebijakan luar negerinya yang bersifat global tak terkecuali di Asia Tenggara yaitu tentang terorisme. Dimana Amerika Serikat tidak dapat menangani sendiri ancaman terorisme ini.

Sepanjang kurun 2000-2008, khususnya setelah peristiwa 9/11 Amerika di bawah pemerintahan Bush mengakhiri embargo senjata kepada Indonesia. Alasannya untuk membantu Indonesia mengatasi masalah keamanan bersama seperti terorisme, maritim pembajakan, perdagangan narkoba, penyakit pandemik, dan bantuan bencana.²⁷ Secara geostrategi Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar dan negara demokrasi terbesar ketiga memainkan peran strategis yang unik di Asia Tenggara. Dengan hal ini Indonesia seharusnya bisa melihat celah untuk memperbaharui persenjataannya melalui transfer teknologi senjata dari negara-negara *first-tier of arms-producing* ini seperti dengan negara Prancis bahkan berkolaborasi dengan negara-negara *second-tier of arms-producing* yang kategori A atau yang berkategori B namun lebih berpengalaman dari Indonesia seperti China dan India.

1.11 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis akan dibagi dalam empat bab. Bab pertama adalah latar belakang mengenai pengaruh transfer senjata di negara-negara Asia Pasifik yang memasuki rantai perdagangan senjata internasional terhadap Indonesia dan pertanyaan penelitian pertanyaan penelitian yang diajukan, serta metodologi penelitian yang digunakan. Bab kedua, secara detail, menjelaskan transfer senjata negara-negara Asia pasifik ke Indonesia selama tahun 2000-2008, pada sub babnya daftar impor senjata-senjata Indonesia dan produk industri pertahanan

²⁶ http://www.armscontrol.org/act/2006_01-02/JANFEB-Indonesia

²⁷ *ibid*

Indonesia pada tahun 2000-2008. Bab ketiga menggambarkan, Perilaku pasar senjata di negara-negara Asia Pasifik pada tahun 2000-2008. Pada sub babnya, ada klasifikasi perilaku industri senjata pada pasar senjata global, pola perdagangan senjata di Asia Pasifik, dan ketergantungan negara Asia Pasifik pada pasar senjata internasional. Bab keempat, sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dari pertanyaan penelitian dan saran atas permasalahan penelitian.

